



PENGUATAN LITERASI POLITIK BAGI PEREMPUAN MUDA UNTUK MENDORONG KETERWAKILAN GENDER DALAM POLITIK LOKAL

Fransin Kontu¹, Umiyati Haris², Anugerah Mulia Utami³, Eko Rachmat Saputro⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Politik

Universitas Musamus

fransin@unmus.ac.id

Received: 04-05-2026

Accepted: 08-06-2026

Published: 15-06-2026

Abstract

Women's participation and representation in politics are important indicators of achieving an inclusive and gender-equitable democracy. However, young Papuan women continue to face various barriers in local politics, including low levels of political literacy, deeply rooted patriarchal cultural norms, limited access to political education, and minimal involvement in public decision-making processes. Data from the Papua Provincial Central Statistics Agency (BPS) indicate that the Gender Empowerment Index (GEI) still reflects disparities in women's participation in strategic sectors, including politics and leadership. This Community Service Program (PkM) aims to enhance the political literacy of young Papuan women in order to promote gender representation in local politics. The program was implemented through three stages: preparation, implementation, and monitoring and evaluation. The methods employed included political education, leadership training, focus group discussions (FGDs), political simulations, and participant mentoring. The results of the program demonstrate an improvement in participants' understanding of democracy, women's political rights, local political systems, and the importance of gender representation. In addition, participants became more confident in expressing their aspirations, engaging in public forums, and developing leadership and advocacy skills. This program contributes to strengthening the political literacy of young Papuan women and encouraging their active involvement in democratic processes and regional development.

Keywords: *political literacy, young Papuan women, gender representation, political participation, local politics, women's empowerment.*

Abstrak

Partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan gender. Namun, perempuan muda Papua masih menghadapi berbagai hambatan dalam politik lokal, seperti rendahnya literasi politik, kuatnya budaya patriarki, terbatasnya akses terhadap pendidikan politik, serta minimnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan publik. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua menunjukkan bahwa Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masih mencerminkan adanya kesenjangan partisipasi perempuan dalam sektor strategis, termasuk politik dan kepemimpinan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan meningkatkan literasi politik perempuan muda Papua untuk mendorong keterwakilan gender dalam politik lokal. Kegiatan dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Metode yang digunakan meliputi pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, diskusi kelompok terarah (FGD), simulasi politik, dan pendampingan peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai demokrasi, hak politik perempuan, sistem politik lokal, dan pentingnya keterwakilan gender. Selain itu, peserta menjadi lebih percaya diri dalam menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam forum publik, serta mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan advokasi. Kegiatan ini berkontribusi dalam meningkatkan literasi politik perempuan muda Papua dan mendorong keterlibatan mereka dalam proses demokrasi serta pembangunan daerah.

Kata Kunci: literasi politik, perempuan muda Papua, keterwakilan gender, partisipasi politik, politik lokal, pemberdayaan perempuan.

A. PENDAHULUAN

Partisipasi politik perempuan merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kualitas demokrasi, tata kelola pemerintahan yang inklusif, serta keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Demokrasi yang substantif tidak hanya ditandai oleh terselenggaranya pemilihan umum secara berkala, tetapi juga oleh keterlibatan seluruh kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk perempuan. Dalam perspektif pembangunan modern, perempuan tidak lagi dipandang sebagai objek pembangunan, melainkan sebagai aktor utama yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik,

ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik menjadi agenda strategis yang terus didorong oleh berbagai negara dan organisasi internasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan sosial (Rambe, 2024).

Secara global, isu keterwakilan perempuan dalam politik masih menjadi tantangan yang belum sepenuhnya teratasi. Meskipun berbagai kebijakan afirmatif telah diterapkan, perempuan masih menghadapi hambatan struktural, budaya, dan institusional dalam mengakses ruang-ruang politik. Menurut Krook (2019), ketidaksetaraan gender dalam politik tidak hanya disebabkan

oleh rendahnya jumlah perempuan yang mencalonkan diri, tetapi juga oleh kuatnya budaya patriarki, stereotip gender, serta keterbatasan akses perempuan terhadap sumber daya politik dan ekonomi. Kondisi ini menyebabkan perempuan sering kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam kompetisi politik dibandingkan laki-laki.

Di Indonesia, upaya peningkatan keterwakilan perempuan telah dilakukan melalui kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30 persen perempuan dalam kepengurusan partai politik dan daftar calon legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memperluas akses perempuan dalam proses politik dan meningkatkan representasi perempuan di lembaga legislatif. Namun demikian, capaian keterwakilan perempuan masih belum mencapai target yang diharapkan. Data KPU dan BPS yang dirilis melalui Statistik Indonesia 2025 menunjukkan bahwa hasil Pemilu 2024 menghasilkan 129 anggota DPR RI perempuan atau sebesar 22,24 persen dari total 580 kursi DPR RI. Angka tersebut memang merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah parlemen Indonesia, tetapi masih berada di bawah target afirmasi 30 persen (DataIndonesia.id, 2025).

Rendahannya keterwakilan perempuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan afirmatif belum sepenuhnya mampu menghilangkan hambatan yang dihadapi perempuan dalam politik. Penelitian Aspinall, White, dan Savirani (2021) menunjukkan bahwa perempuan calon legislatif di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala berupa keterbatasan sumber daya finansial, lemahnya dukungan partai politik, jaringan politik yang terbatas, serta budaya patriarki yang masih memandang laki-laki lebih layak menjadi pemimpin dibandingkan perempuan. Hambatan tersebut menyebabkan perempuan sering kali hanya menjadi

pelengkap kuota tanpa memperoleh dukungan yang memadai untuk memenangkan kontestasi politik.

Kondisi tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan konteks Papua. Sebagai wilayah yang memiliki keragaman budaya dan karakteristik sosial yang khas, perempuan Papua menghadapi tantangan yang lebih besar dalam memperoleh akses terhadap ruang-ruang politik. Dalam berbagai komunitas adat di Papua, struktur sosial masih didominasi oleh laki-laki sehingga posisi perempuan dalam pengambilan keputusan publik relatif terbatas. Budaya patriarki yang kuat menyebabkan perempuan sering kali ditempatkan sebagai pendukung aktivitas domestik, sementara posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Akibatnya, partisipasi perempuan dalam organisasi politik, lembaga legislatif, maupun jabatan publik lainnya masih relatif rendah.

Data pembangunan gender menunjukkan bahwa Papua masih menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan gender. Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Papua mengenai Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), nilai IPG Papua pada tahun 2021 tercatat sebesar 80,31 dan meningkat menjadi 81,17 pada tahun 2022. Sementara itu, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang menggambarkan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan politik berada pada angka 68,24 pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 69,11 pada tahun 2022. Meskipun mengalami peningkatan, angka tersebut masih menunjukkan bahwa perempuan Papua belum memperoleh kesempatan yang setara dengan laki-laki dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk dalam bidang politik (BPS, 2022).

Perkembangan terbaru menunjukkan bahwa kesenjangan gender di Papua masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Berdasarkan Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Papua tahun 2025, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Papua tahun 2024 tercatat sebesar 0,479. Nilai tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan gender di Papua masih berada pada kategori menengah dan dipengaruhi oleh ketimpangan dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta partisipasi ekonomi perempuan. Tingginya ketimpangan gender ini mengindikasikan bahwa perempuan Papua masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses terhadap sumber daya pembangunan dan posisi strategis dalam pengambilan keputusan public (BPS, 2025).

Selain itu, kualitas pembangunan manusia di Papua juga masih menghadapi berbagai tantangan. Data BPS menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua tahun 2024 mencapai 73,83, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 73,23. Meskipun mengalami peningkatan, capaian tersebut masih menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia, termasuk peningkatan kapasitas perempuan muda dalam berbagai bidang kehidupan sosial dan politik (BPS, 2025).

Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi politik perempuan muda adalah rendahnya literasi politik. Literasi politik merupakan kemampuan individu untuk memahami sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, proses pengambilan keputusan publik, serta kemampuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokrasi. Menurut Crick (2018), literasi politik merupakan fondasi penting bagi terbentuknya warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Individu

yang memiliki literasi politik yang baik cenderung lebih memahami hak-hak politiknya, lebih aktif dalam kegiatan demokrasi, serta memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingannya.

Dalam konteks Papua, penguatan literasi politik bagi perempuan muda menjadi sangat penting karena kelompok ini merupakan generasi yang akan menentukan arah pembangunan daerah pada masa mendatang. Perempuan muda Papua memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan sosial dan politik yang mampu memperjuangkan kepentingan perempuan, anak, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Namun, tanpa pengetahuan dan pemahaman politik yang memadai, perempuan muda akan sulit berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi maupun mengakses posisi-posisi strategis dalam pemerintahan dan politik lokal.

Lebih lanjut, perkembangan teknologi informasi dan media digital juga menghadirkan tantangan baru bagi partisipasi politik perempuan. Arus informasi politik yang sangat cepat sering kali disertai dengan penyebaran hoaks, disinformasi, ujaran kebencian, dan kekerasan berbasis gender di ruang digital. Krook (2019) menjelaskan bahwa kekerasan politik berbasis gender menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perempuan enggan terlibat dalam politik. Oleh karena itu, penguatan literasi politik perlu diintegrasikan dengan peningkatan kemampuan berpikir kritis dan literasi digital agar perempuan muda mampu menyaring informasi secara bijak dan berpartisipasi secara aman dalam ruang publik.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema "Penguatan Literasi Politik bagi Perempuan Muda Papua untuk Mendorong Keterwakilan Gender dalam Politik Lokal" menjadi sangat relevan untuk dilaksanakan. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman

perempuan muda mengenai sistem politik, demokrasi, hak-hak politik warga negara, kepemimpinan perempuan, advokasi kebijakan publik, serta pentingnya keterwakilan gender dalam pembangunan daerah. Melalui kegiatan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, diskusi partisipatif, dan pendampingan komunitas, diharapkan perempuan muda Papua memiliki kapasitas yang lebih baik untuk berpartisipasi dalam proses politik lokal.

Pada akhirnya, penguatan literasi politik diharapkan mampu melahirkan generasi perempuan muda Papua yang memiliki kesadaran politik tinggi, mampu berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, serta terdorong untuk mengambil peran kepemimpinan dalam berbagai organisasi dan lembaga publik. Dengan meningkatnya partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik lokal, pembangunan daerah akan menjadi lebih inklusif, responsif gender, dan berkeadilan sosial.

B. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) “Penguatan Literasi Politik bagi Perempuan Muda Papua untuk Mendorong Keterwakilan Gender dalam Politik Lokal” dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring serta evaluasi (monev). Metode ini dirancang secara partisipatif dengan melibatkan perempuan muda sebagai subjek utama kegiatan sehingga mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kesadaran politik peserta secara berkelanjutan.

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal yang bertujuan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan sasaran. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi:

a. Analisis Situasi dan Identifikasi Kebutuhan

Tim pelaksana melakukan observasi lapangan, wawancara awal, dan diskusi dengan tokoh perempuan, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, serta pemerintah daerah untuk mengidentifikasi tingkat literasi politik perempuan muda dan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam partisipasi politik lokal. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kebutuhan peserta sehingga materi yang diberikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

b. Koordinasi dengan Mitra

Tim melakukan koordinasi dengan pemerintah kampung, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, perguruan tinggi, dan lembaga terkait sebagai mitra pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dilakukan untuk memperoleh dukungan kelembagaan, menentukan lokasi kegiatan, serta menjangkau calon peserta yang sesuai dengan kriteria sasaran.

c. Penyusunan Modul dan Instrumen

Pada tahap ini tim menyusun modul pelatihan yang mencakup materi:

- Dasar-dasar demokrasi dan politik lokal;
- Hak politik perempuan dalam perspektif hukum dan HAM;
 1. Kepemimpinan perempuan dalam politik;
 2. Literasi politik dan literasi digital;
 3. Partisipasi politik dan advokasi kebijakan publik;
 4. Strategi meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik lokal.

Selain itu, tim juga menyusun instrumen pre-test, post-test, lembar observasi, kuesioner evaluasi, dan pedoman wawancara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program.

d. Rekrutmen Peserta

Peserta kegiatan terdiri atas perempuan muda Papua berusia 17–30 tahun yang berasal dari organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, mahasiswa, pelajar, dan komunitas masyarakat. Jumlah peserta direncanakan sebanyak 10–30 orang yang memiliki minat terhadap isu kepemimpinan, demokrasi, dan pemberdayaan perempuan.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dilakukan melalui pendekatan pendidikan politik partisipatif yang mengutamakan keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran. Metode yang digunakan meliputi ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, simulasi, praktik advokasi, dan pendampingan.

a. Sosialisasi dan Pembukaan Program

Kegiatan diawali dengan sosialisasi mengenai tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan program kepada peserta dan mitra. Pada tahap ini juga dilakukan pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta mengenai politik, demokrasi, dan keterwakilan perempuan.

b. Pelatihan Literasi Politik

Pelatihan dilaksanakan dalam beberapa sesi yang mencakup:

Sesi 1: Demokrasi dan Politik Lokal

Peserta diberikan pemahaman mengenai konsep demokrasi, sistem politik Indonesia, fungsi lembaga pemerintahan daerah, serta pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik lokal. Pada sesi ini, materi disampaikan oleh Fransin Kontu, S.IP., M.Si.

Sesi 2: Hak Politik Perempuan dan Kesetaraan Gender

Peserta memperoleh materi mengenai hak-hak politik perempuan, kebijakan afirmatif 30% keterwakilan perempuan, serta tantangan dan peluang perempuan dalam politik Indonesia dan Papua. Pada sesi ini, materi disampaikan oleh Anugerdah Mulia Utami, S. IP., M.Si.

Sesi 3: Kepemimpinan Perempuan dalam Politik

Materi difokuskan pada pengembangan karakter kepemimpinan, komunikasi politik, pengambilan keputusan, serta penguatan kepercayaan diri perempuan muda untuk terlibat dalam ruang publik. Pada sesi ini, materi disampaikan oleh Umiyati Haris, S.IP., M.Si

Sesi 4: Literasi Digital dan Informasi Politik

Peserta dilatih untuk mengenali hoaks politik, disinformasi, ujaran kebencian, serta cara memanfaatkan media digital secara positif dalam pendidikan politik dan advokasi sosial. Pada sesi ini, materi disampaikan oleh Eko Rachmat Saputro, S.Sos., M.Si.

Sesi 5: Advokasi Kebijakan Publik

Peserta diperkenalkan pada teknik identifikasi masalah sosial, penyusunan aspirasi masyarakat, penyampaian rekomendasi kebijakan, serta strategi advokasi kepada pemerintah daerah. Pada sesi ini, materi disampaikan oleh Eko Rachmat Saputro, S.Sos., M.Si.

c. Diskusi Kelompok Terarah (FGD)

Peserta dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan politik lokal di Papua. Setiap kelompok diminta mengidentifikasi masalah, faktor penyebab, serta solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam politik

lokal. Sesi ini dipandu oleh Fransin Kontu, S.IP., M.Si bersama tim.

d. Simulasi Politik dan Kepemimpinan

Peserta mengikuti simulasi proses politik, seperti:

1. Simulasi sidang legislatif;
2. Simulasi musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang);
3. Simulasi kampanye dan penyampaian aspirasi publik;
4. Simulasi penyusunan rekomendasi kebijakan.

Kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman praktis kepada peserta mengenai mekanisme pengambilan keputusan politik.

e. Pendampingan dan Mentoring

Setelah pelatihan, peserta memperoleh pendampingan dari tim pelaksana dan narasumber. Pendampingan dilakukan untuk membantu peserta mengimplementasikan pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan organisasi, forum diskusi publik, maupun keterlibatan dalam kegiatan sosial dan politik di lingkungan masing-masing.

3. Tahap Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program serta mengukur tingkat pencapaian tujuan kegiatan.

a. Monitoring

Monitoring dilakukan selama pelaksanaan kegiatan melalui:

1. Pengamatan kehadiran dan partisipasi peserta;
2. Observasi keterlibatan peserta dalam diskusi dan simulasi;
3. Dokumentasi aktivitas pelatihan;
4. Pendampingan berkala kepada peserta.

Monitoring bertujuan memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi kendala yang muncul selama pelaksanaan program.

b. Evaluasi Hasil

Evaluasi dilakukan melalui beberapa metode:

1) Pre-test dan Post-test

Digunakan untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah mengikuti pelatihan. Indikator yang diukur meliputi:

- Pemahaman tentang demokrasi;
- Pengetahuan mengenai hak politik perempuan;
- Pemahaman mengenai sistem politik lokal;
- Pengetahuan tentang keterwakilan gender.

2) Kuesioner Kepuasan Peserta

Digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta terhadap materi, narasumber, metode pelatihan, dan manfaat kegiatan juga untuk memperoleh umpan balik secara mendalam mengenai perubahan sikap, motivasi, dan kesiapan peserta dalam berpartisipasi pada kegiatan politik lokal.

c. Indikator Keberhasilan

Keberhasilan program diukur melalui indikator berikut:

Tabel 1. Indikator Keberhasilan Program

Indikator	Target
Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan	≥ 30 orang
Tingkat kehadiran peserta	≥ 80%
Peningkatan nilai post-test dibanding pre-test	≥ 30%
Peserta memahami hak politik dan keterwakilan gender	≥ 80% peserta
Peserta mampu menyusun rekomendasi kebijakan sederhana	≥ 75% peserta
Tingkat kepuasan peserta terhadap program	≥ 85%

d. Penyusunan Laporan dan Tindak Lanjut

Tahap akhir dilakukan melalui penyusunan laporan kegiatan yang berisi capaian program, hasil evaluasi, dokumentasi kegiatan, serta rekomendasi tindak lanjut. Selain itu, akan dibentuk jejaring komunikasi peserta sebagai wadah berbagi informasi dan penguatan kapasitas perempuan muda Papua dalam bidang politik dan kepemimpinan secara berkelanjutan.

Dengan metode pelaksanaan yang sistematis tersebut, program ini diharapkan mampu meningkatkan literasi politik perempuan muda Papua, memperkuat kapasitas kepemimpinan mereka, serta mendorong tumbuhnya partisipasi dan keterwakilan perempuan yang lebih besar dalam politik lokal.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan tema “Penguatan Literasi Politik bagi Perempuan Muda Papua untuk Mendorong Keterwakilan Gender dalam Politik Lokal” dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, diskusi kelompok terarah (FGD), simulasi politik, dan pendampingan peserta. Sasaran kegiatan adalah perempuan muda Papua yang berasal dari organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, mahasiswa, pelajar, dan komunitas masyarakat.



Gambar 1 dan 2. Proses Identifikasi Masalah Sosial

Pelaksanaan kegiatan diikuti oleh 20 perempuan muda Papua yang memiliki rentang usia 17–30 tahun. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara aktif mulai dari tahap sosialisasi hingga evaluasi akhir. Berdasarkan hasil observasi selama pelaksanaan kegiatan, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi terutama pada sesi yang membahas hak politik perempuan, kepemimpinan perempuan, dan strategi meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik lokal.



Gambar 3. Pre-Test

Hasil pre-test menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai sistem politik lokal, fungsi lembaga pemerintahan daerah, kebijakan afirmasi 30 persen keterwakilan perempuan, dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Dari total peserta, hanya sekitar 42,5% yang memahami konsep keterwakilan gender dalam politik, sedangkan 57,5% lainnya belum memahami secara memadai.

Setelah mengikuti seluruh rangkaian pelatihan, hasil post-test menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan. Sebanyak 85% peserta mampu menjelaskan konsep demokrasi, hak politik perempuan, serta pentingnya keterwakilan perempuan dalam lembaga politik lokal. Selain itu, 82,5% peserta memahami mekanisme penyusunan kebijakan publik dan saluran partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.



Gambar 4. Post-Test

Pada sesi simulasi politik, peserta menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menyampaikan pendapat, menyusun argumentasi, dan melakukan

advokasi terhadap isu-isu perempuan dan pembangunan daerah. Sebagian besar peserta mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi perempuan di lingkungan mereka, seperti rendahnya akses pendidikan, kekerasan berbasis gender, keterbatasan peluang ekonomi, dan rendahnya keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan kampung atau distrik.



Gambar 5. Sesi Foto Bersama

Melalui kegiatan diskusi kelompok terarah (FGD), peserta berhasil merumuskan beberapa rekomendasi yang dianggap penting untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan muda di Papua, antara lain:

1. Peningkatan pendidikan politik sejak usia sekolah.
2. Pembentukan forum perempuan muda tingkat kampung dan distrik.
3. Penguatan kaderisasi perempuan dalam partai politik.
4. Pelibatan perempuan muda dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
5. Pemanfaatan media digital sebagai sarana pendidikan politik dan advokasi kebijakan.

Hasil evaluasi kepuasan peserta menunjukkan bahwa 90% peserta menyatakan kegiatan sangat bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan mereka. Peserta menilai bahwa kegiatan ini memberikan pengetahuan baru mengenai politik yang

selama ini dianggap sebagai ranah yang hanya dapat diakses oleh laki-laki.

2. Pembahasan

a. Penguatan Literasi Politik sebagai Instrumen Pemberdayaan Perempuan Muda

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa literasi politik memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas perempuan muda untuk terlibat dalam kehidupan politik. Sebelum mengikuti pelatihan, sebagian besar peserta memiliki pemahaman yang terbatas mengenai hak-hak politik dan mekanisme politik lokal. Kondisi tersebut sejalan dengan temuan Crick (2018) yang menyatakan bahwa rendahnya literasi politik sering kali menjadi hambatan utama bagi kelompok muda untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.

Melalui pelatihan dan pendidikan politik yang diberikan, peserta memperoleh pengetahuan mengenai sistem politik, fungsi lembaga pemerintahan daerah, hak politik warga negara, dan pentingnya keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan. Peningkatan pengetahuan tersebut tercermin dari meningkatnya nilai post-test peserta dibandingkan dengan nilai pre-test. Hasil ini menunjukkan bahwa pendidikan politik merupakan strategi yang efektif untuk memperkuat kapasitas perempuan muda dalam memahami dan mengakses ruang-ruang politik.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Coffé dan Bolzendahl (2017) yang menjelaskan bahwa tingkat pendidikan dan literasi politik memiliki hubungan positif dengan partisipasi politik perempuan. Semakin tinggi pemahaman politik seseorang, semakin besar pula kemungkinan untuk terlibat dalam aktivitas politik dan sosial.

b. Kepemimpinan Perempuan dan Tantangan Budaya Patriarki

Salah satu isu yang banyak muncul dalam diskusi peserta adalah masih kuatnya budaya patriarki yang membatasi ruang gerak perempuan dalam kehidupan publik. Sebagian peserta mengungkapkan bahwa perempuan sering kali dianggap kurang layak menjadi pemimpin dibandingkan laki-laki, baik dalam lingkungan keluarga, komunitas adat, maupun organisasi masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Aspinall, White, dan Savirani (2021) yang menyebutkan bahwa perempuan Indonesia masih menghadapi hambatan budaya dan struktural dalam memperoleh posisi politik. Di Papua, tantangan tersebut menjadi lebih kompleks karena adanya sistem sosial yang masih menempatkan laki-laki sebagai aktor dominan dalam proses pengambilan keputusan.

Melalui pelatihan kepemimpinan, peserta diberikan pemahaman bahwa kepemimpinan bukan ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh kapasitas, kompetensi, dan kemampuan dalam mengelola organisasi serta memperjuangkan kepentingan masyarakat. Kegiatan simulasi kepemimpinan yang dilakukan selama program berhasil meningkatkan kepercayaan diri peserta untuk tampil di ruang publik dan menyampaikan aspirasi secara terbuka.

c. Literasi Politik dan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan

Peningkatan literasi politik yang diperoleh peserta tidak hanya berdampak pada aspek pengetahuan, tetapi juga pada perubahan sikap dan motivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik lokal. Setelah mengikuti kegiatan, sebagian besar peserta menyatakan lebih tertarik untuk terlibat dalam organisasi masyarakat, forum pemuda, organisasi perempuan, maupun kegiatan pembangunan kampung.

Menurut Verba, Schlozman, dan Brady (2018), partisipasi politik dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu sumber daya, keterlibatan psikologis, dan mobilisasi politik. Dalam konteks kegiatan ini, peningkatan literasi politik berfungsi sebagai sumber daya pengetahuan yang mendorong munculnya keterlibatan psikologis peserta terhadap isu-isu publik.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan politik dapat menjadi sarana pemberdayaan yang efektif bagi perempuan muda Papua. Ketika perempuan memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan perannya dalam demokrasi, mereka cenderung lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pembangunan.

d. Penguatan Keterwakilan Gender dalam Politik Lokal

Keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya berkaitan dengan jumlah perempuan yang menduduki jabatan publik, tetapi juga menyangkut kemampuan perempuan untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dalam kegiatan ini, peserta memahami bahwa representasi perempuan penting untuk memastikan kebijakan publik lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan dan kelompok rentan.

Pandangan tersebut sejalan dengan teori *Politics of Presence* yang dikemukakan oleh Phillips (2018). Teori ini menjelaskan bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga politik diperlukan agar pengalaman dan kepentingan perempuan dapat terwakili secara langsung dalam proses perumusan kebijakan.

Melalui diskusi dan simulasi kebijakan, peserta mampu mengidentifikasi berbagai isu lokal yang membutuhkan perhatian pemerintah, seperti pendidikan perempuan, kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta

pemberdayaan ekonomi perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan muda memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan sosial apabila memperoleh akses terhadap pendidikan politik yang memadai.

e. Implikasi Program terhadap Pembangunan Papua

Program penguatan literasi politik ini memberikan kontribusi penting terhadap upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan di Papua. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peserta, tetapi juga membangun kesadaran kritis mengenai pentingnya keterlibatan perempuan dalam pembangunan daerah.

Dalam jangka panjang, peningkatan literasi politik perempuan muda diharapkan dapat mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya:

- Tujuan 5: Kesetaraan Gender;
- Tujuan 10: Mengurangi Ketimpangan;
- Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

Dengan meningkatnya kapasitas politik perempuan muda, peluang munculnya pemimpin perempuan di tingkat kampung, distrik, kabupaten, maupun provinsi akan semakin besar. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memperkuat keterwakilan gender dalam politik lokal dan menciptakan proses pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) “Penguatan Literasi Politik bagi Perempuan Muda Papua untuk Mendorong Keterwakilan Gender dalam Politik Lokal” telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kapasitas politik perempuan muda Papua. Melalui kegiatan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, diskusi kelompok terarah, simulasi politik, dan pendampingan, peserta memperoleh pengetahuan yang lebih baik mengenai sistem politik, demokrasi, hak-hak politik perempuan, serta pentingnya keterwakilan gender dalam proses pengambilan keputusan publik.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan literasi politik peserta yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman mengenai fungsi lembaga politik, mekanisme partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta kebijakan afirmatif yang mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan kepercayaan diri peserta untuk menyampaikan aspirasi, berpartisipasi dalam forum publik, dan mengambil peran kepemimpinan dalam lingkungan sosial maupun organisasi masyarakat.

Pembahasan hasil kegiatan menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi politik perempuan muda di Papua tidak hanya dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan politik, tetapi juga oleh faktor budaya patriarki, minimnya akses terhadap pendidikan politik, dan rendahnya keterlibatan perempuan dalam ruang pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penguatan literasi politik menjadi strategi penting dalam mendorong pemberdayaan perempuan muda serta memperluas peluang mereka untuk berpartisipasi dalam politik lokal.

Kegiatan ini juga menegaskan bahwa perempuan muda Papua memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan sosial dan politik. Dengan dukungan pendidikan politik yang berkelanjutan, perempuan muda dapat berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, mengawal kebijakan publik, dan berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif gender.

Secara keseluruhan, program ini berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan literasi politik perempuan muda Papua sebagai langkah awal dalam mendorong peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik lokal. Penguatan kapasitas politik perempuan muda diharapkan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi pemimpin perempuan yang mampu berkontribusi terhadap pembangunan Papua yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan gender.

B. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi untuk pengembangan program di masa mendatang, yaitu:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah perlu memperluas program pendidikan politik dan kepemimpinan bagi perempuan muda secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga penyelenggara pemilu. Selain itu, pemerintah perlu memberikan ruang yang lebih besar bagi perempuan untuk terlibat dalam forum-forum perencanaan pembangunan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, dan lembaga kemasyarakatan lainnya.

2. Bagi Partai Politik

Partai politik diharapkan tidak hanya memenuhi kuota keterwakilan perempuan secara administratif, tetapi juga melakukan kaderisasi yang sistematis bagi perempuan muda. Pelatihan kepemimpinan, pendidikan politik, dan pendampingan kader perempuan perlu ditingkatkan agar perempuan memiliki kapasitas yang memadai untuk berkompetisi dalam kontestasi politik.

3. Bagi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi perlu terus mengembangkan program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pendidikan politik masyarakat. Selain itu, hasil kegiatan ini dapat menjadi dasar untuk penelitian lanjutan mengenai partisipasi politik perempuan muda, literasi politik, dan keterwakilan gender di Papua.

4. Bagi Organisasi Perempuan dan Organisasi Kepemudaan

Organisasi perempuan dan organisasi kepemudaan diharapkan dapat menjadi wadah pengembangan kapasitas perempuan muda melalui berbagai kegiatan diskusi, pelatihan, advokasi, dan pendidikan politik. Organisasi juga dapat membangun jaringan kolaborasi untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah.

5. Bagi Perempuan Muda Papua

Perempuan muda Papua perlu terus meningkatkan kapasitas diri melalui pendidikan, pelatihan, organisasi, dan keterlibatan aktif dalam kegiatan sosial maupun politik. Kesadaran bahwa politik merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat perlu terus ditumbuhkan agar perempuan tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi aktor utama dalam proses pengambilan keputusan publik.

6. Bagi Program Pengabdian Selanjutnya

Program serupa perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan cakupan peserta yang lebih luas hingga tingkat kampung dan distrik. Selain literasi politik, materi mengenai literasi digital, advokasi kebijakan publik, komunikasi politik, dan kewirausahaan sosial juga perlu diintegrasikan untuk memperkuat kapasitas perempuan muda dalam menghadapi tantangan pembangunan dan demokrasi di era digital.

Dengan adanya tindak lanjut yang berkesinambungan dari berbagai pihak, diharapkan perempuan muda Papua semakin memiliki kemampuan, keberanian, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam politik lokal sehingga dapat meningkatkan keterwakilan gender dan mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, demokratis, serta berkeadilan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang berjudul “Penguatan Literasi Politik bagi Perempuan Muda Papua untuk Mendorong Keterwakilan Gender dalam Politik Lokal” dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

Tim pelaksana menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kerja sama selama pelaksanaan kegiatan ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

1. Pimpinan Universitas Musamus yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada tim untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari

- pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memberikan arahan, fasilitasi, dan dukungan administratif sehingga kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik.
 3. Pemerintah kampung yang telah memberikan izin, dukungan, dan kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan.
 4. Perempuan muda Papua sebagai peserta kegiatan, yang telah menunjukkan antusiasme, semangat belajar, dan partisipasi aktif selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung. Kehadiran dan kontribusi para peserta menjadi faktor penting dalam keberhasilan program ini.
 5. Mitra kerja, organisasi perempuan, organisasi kepemudaan, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moral maupun materil sehingga kegiatan ini dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dalam meningkatkan literasi politik, kapasitas kepemimpinan, serta partisipasi perempuan muda Papua dalam kehidupan politik dan pembangunan daerah. Semoga kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut pada kegiatan-kegiatan pengabdian berikutnya demi mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif, demokratis, dan berkeadilan gender.

REFERENSI

- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). *Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?* *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 3–27.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2023). *Analisis Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi Papua Tahun 2017–2021*. Jayapura: BPS Provinsi Papua
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2025). *Indeks Ketimpangan Gender 2024 Provinsi Papua*. Jayapura: BPS Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2024*. Jayapura: BPS Provinsi Papua
- Coffé, H., & Bolzendahl, C. (2017). *Avoiding the Gender Gap in Political Participation*. *Political Behavior*, 39(1), 149–173.
- Crick, B. (2018). *Political Literacy and Civic Education*. Routledge.
- Muthmaina, J. S. (2024). *The Femininomenon of Inequality: A Data-Driven Analysis and Cluster Profiling in Indonesia*. arXiv
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Phillips, A. (2018). *The Politics of Presence*. Oxford University Press.
- Rahmat, J. (2019). *Psikologi Komunikasi Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rambe, R. D., Dompok, T., & Salsabila, L. (2024). *Keterwakilan Perempuan dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024–2029)*. *Jurnal Pemerintahan dan Politik*, 10(1).

Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (2018). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.

Yuliana, S. (2020). *Komunikasi Politik di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.